

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

##### 1. **Anggi Pratama Nasution & Atika (2019)**

Judul dari penelitian yang diteliti oleh Nasution & Atika (2019) “Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai”. Tujuan penelitian adalah untuk mengupayakan peningkatan kinerja kerja berdasarkan beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) seperti transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai. Variabel Independen yang digunakan adalah *e-budgeting*. Variabel Dependen yang digunakan adalah transparansi dan akuntabilitas. Sampel yang digunakan berjumlah 52 orang untuk semua SKPD di Kota Binjai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratama Nasution dan Atika (2019) menyatakan bahwa meskipun hubungan *e-budgeting* rendah dengan akuntabilitas dan transparansi tetapi tingkat pencapaian *e-budgeting* telah tercapai dengan baik dalam upaya meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan bahwa peran

sistem *e-budgeting* dalam meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah Kota Binjai telah tercapai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini antara lain:

- a. Adanya kesamaan variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian terkini menggunakan *e-budgeting* untuk topik yang digunakan pada Pemerintahan.
- b. Adanya kesamaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti terkini yaitu menggunakan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Adanya kesamaan pada pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti terkini, yaitu menggunakan kuesioner.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini antara lain:

- a. Adanya perbedaan objek penelitian terdahulu adalah Pemerintah Daerah Kota Binjai sedangkan peneliti terkini pada Pemerintah Kota Surabaya.
- b. Adanya perbedaan pada tahun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu tahun 2018 sedangkan peneliti terkini pada tahun 2019.
- c. Adanya perbedaan sampel yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai sedangkan peneliti terkini hanya meneliti di seluruh Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

## 2. Dito Aditia Darma Nasution & Puja Rizqy Ramadhan (2019)

Judul dari penelitian yang diteliti oleh D. A. D. Nasution & Ramadhan (2019) “Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan

Daerah di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Variabel Independen yang digunakan adalah *e-budgeting*. Variabel Dependen yang digunakan adalah transparansi keuangan daerah. Sampel yang digunakan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel penelitian secara non probabilitas (pemilihan *non-random*) dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darna Nasution dan Puja Rizqy Ramadhan (2019) menyatakan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini memberikan implikasi berupa kontribusi yang bermanfaat bagi pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting implementasi *e-budgeting* untuk mendorong transparansi keuangan daerah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik implementasi *e-budgeting* dan transparansi keuangan daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini antara lain:

- a. Adanya kesamaan variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian terkini menggunakan implementasi *e-budgeting* untuk topik yang digunakan pada Pemerintahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini antara lain:

- a. Adanya perbedaan pada tahun penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu tahun 2018 sedangkan peneliti terkini pada tahun 2019.
- b. Adanya perbedaan pada teori yang digunakan peneliti terdahulu yaitu teori agensi sedangkan peneliti terkini menggunakan teori *stewardship*.
- c. Adanya perbedaan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan transparansi, sedangkan peneliti terkini menggunakan transparansi dan akuntabilitas.
- d. Adanya perbedaan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti terkini yaitu peneliti terdahulu menggunakan Pemerintah Daerah di Indonesia, sedangkan peneliti terkini menggunakan Pemerintah Kota Surabaya.
- e. Adanya perbedaan pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti terdahulu menggunakan data sekunder, sedangkan peneliti terkini menggunakan data primer.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Peneliti Terdahulu**

No	Peneliti Terdahulu	Tahun	Implementasi <i>E-Budgeting</i>
1.	Anggi Pratama Nasution, Atika	2019	Tidak Berpengaruh
2.	Dito Aditia Darma Nasution, Puja Rizqy Ramadhan	2019	Berpengaruh

## 2.2 Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Teori yang digunakan untuk mendukung pemahaman dan dasar penulisan penelitian.

### 2.2.1 Teori *Stewardship*

*Stewardship Theory* yang dikembangkan oleh (Donaldson & Davis, 1991) adalah paradigma baru untuk memahami adanya hubungan antara pemilik dan manajemen dari organisasi. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama.

Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer (manajemen) termotivasi pada tujuan dari hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dengan mengesampingkan tujuan-tujuan individu. Dalam teori ini manajemen sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Selain itu, perilaku *steward* cenderung loyal pada organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Dalam sektor pemerintah *steward* sebagai manajemen dapat diartikan Pemerintah Daerah dan *principal* diartikan sebagai rakyat. Dengan demikian, *steward* (manajemen) yang diberi kepercayaan oleh *principal* (rakyat) akan semakin termotivasi untuk bertindak sesuai tujuan organisasi (pemerintah daerah) dibanding kepentingan sendiri. Penggunaan teori *stewardship* dalam penelitian ini

yaitu pemerintah dalam mencapai tujuan visi dan misinya, salah satunya dapat menggunakan alat berupa *E-Budgeting* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran sehingga mampu untuk mendorong transparansi keuangan daerah.

Teori *stewardship* mengasumsi bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. *Steward* melindungi dan memaksimalkan kepuasan *principal* melalui kinerja yang dicapai. *Steward* yang berhasil meningkatkan kinerja akan mampu memuaskan organisasi karena sebagian besar rakyat memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja instansi, disamping dapat memberikan kepuasan kepada rakyat.

## **2.3 Tinjauan Literatur**

### **2.3.1 Anggaran**

#### **2.3.1.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran haruslah dikelola dengan baik agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut (Hariadi, Restianto, & Bawono, 2010), yang dimaksud dengan anggaran adalah “Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Hal ini berarti bahwa anggaran tersebut merupakan besaran biaya yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja

dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa: Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penganggaran dalam organisasi publik khususnya pemerintahan merupakan tahapan yang cukup kompleks karena penganggaran pada pemerintahan terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam satu periode pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh (Whicker, 2002) bahwa *“budget are used to implement both economic policy goal and specific program needs”* (Anggaran digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan ekonomi dan kebutuhan program yang spesifik).

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut (Mardiasmo, 2002) mengemukakan bahwa anggaran adalah *“Merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang akan dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.”* Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada

program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk. (2005: 27) adalah sebagai berikut: “Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.” Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi.

Menurut (Bastian, 2014) prinsip-prinsip penganggaran sektor publik meliputi :

- a. Demokratis yaitu anggaran baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran haruslah ditetapkan melalui proses mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.
- b. Adil artinya anggaran diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara ukurannya dialokasikan bagi semua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Transparan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diketahui oleh masyarakat.
- d. Bermoral tinggi yaitu pengelolaan anggaran berpegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku dan senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.



- e. Berhati-hati, pengelolaan anggaran kesehatan harus dilakukan secara berhati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya.
- f. Akuntanbel yaitu pengelolaan keuangan organisasi sektor publik dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

#### **2.3.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut (Daries, 2008), penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang diungkapkan menurut (Mardiasmo, 2009) yang terdiri atas:

##### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

##### **2. Tahap Ratifikasi**

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan mental yang tinggi. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai

kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

### 3. Tahap Implementasi

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

### 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

Anggaran daerah atau APBD merupakan alat kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibagi dalam 4 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD
- c. Penyusunan RAPBD
- d. Pembahasan dan Penetapan APBD

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) guna dibahas dan disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah (Perda).

Sesuai dengan paragraf penjelas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai Perencanaan dan Penganggaran yang disebutkan bahwa : APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah

itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran juga perlu memperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

### **2.3.2 E-Budgeting**

#### **2.3.2.1 Pengertian E-Budgeting**

*E-Budgeting* merupakan salah satu bentuk aplikasi *e-government* dalam bidang anggaran. *E-budgeting* bisa diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Dimana sistem ini menyangkut pengelolaan uang rakyat (*public money*) yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional dan berkeadilan

termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Sedangkan reformasi anggaran tersebut (*budgeting reform*) itu sendiri meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Menurut D. A. D. Nasution & Ramadhan (2019), Implementasi *E-Budgeting* pemerintah daerah didefinisikan sebagai proses memformulasi/perencanaan dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan terkait dengan anggaran melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis) secara elektronik.

#### **2.3.2.2 Ruang Lingkup *E-Budgeting***

1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Revisi DPA SKPD.
4. Penyusunan Perubahan APBD (PAK).

#### **2.3.2.3 Definisi**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarnya untuk periode 1 tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA pada Sekretariat Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA/KPA pada Sekretariat Daerah.
18. Bappeko atau Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah salah satu tim anggaran yang bertugas untuk mengisikan kegiatan, target output, nilai pagu dan sub title dalam kegiatan untuk masing-masing SKPD.
19. Tim Data adalah tim data pada Bagian Bina Program yang bertanggungjawab terhadap kegiatan input, update dan delete data SSH, HSPK, ASB dan estimasi.
20. Penyelia adalah penyelia pada Bappeko, Bagian Bina Program dan DPPK yang bertugas mendampingi SKPD dalam penyusunan anggaran.
21. Admin adalah staf di Bagian Bina Program yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan ketersediaan data dalam menunjang proses penyusunan anggaran.



22. SSH (Standar Satuan Harga) adalah harga setiap unit baran/jasa yang berlaku disuatu daerah (Permendagri No 13/2006 Pasal 93 ayat (5) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21/2011).
23. HSPK atau Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
24. ASB atau Analisa Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat 4 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011).

### **2.3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnya dengan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan

pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah demikian sebaliknya pengelolaan keuangan daerah yang buruk akan membuat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Halim (2001) yang menyatakan: “pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi”. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Bratakusumah dan Solihin (2004) yang menyebutkan: “pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dalam kerangka APBD yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait langsung dengan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri, artinya semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah maka kemungkinan kinerja keuangan daerah akan semakin baik.

#### **2.3.4 Pengertian Keuangan Daerah**

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999).

Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan et.al, 1997).

### **2.3.5 Transparansi**

#### **2.3.5.1 Pengertian Transparansi**

Coryanata (2007) mengatakan: “transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat

waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

(Annisaningrum, 2010), menyatakan: “transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh publik (masyarakat), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Lulaj & Haxhi, 2019). Pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat

birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, “media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012)”. Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik dikarenakan terdapat hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. (Pasaribu., 2011) mengatakan: “transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

### **2.3.5.2 Prinsip-prinsip Transparansi**

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

(Mustopadidjaja A.R., 2002), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

(Mardiasmo, 2009) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran tersebut. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Aspek mekanisme pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparansi, ada hal-hal yang perlu diketahui yaitu (Tahir, 2011) :

1. Penetapan posisi jabatan
2. Kekayaan pejabat publik



3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik

Transparansi merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. (Tahir, 2011) mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

1. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
3. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi

### **2.3.5.3 Dimensi Transparansi**

Menurut (Werimon, Simson, Ghazali, & Nasir, 2007) “prinsip transparansi meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak

masyarakat terhadap akses informasi”. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. (Werimon et al., 2007) juga menyebutkan bahwa: “kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukan auditing sektor publik dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

(Mardiasmo, 2009) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Menurut (Krina, 2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- c. Kemudahan akses informasi.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator (Ardianto & Elvinaro, 2007) sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
  - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - c. Adanya basis legal untuk pajak.
  - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah
  - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
  - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
  - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
  - c. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
  - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
  - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan actual
3. Adanya audit yang independen dan efektif
  - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
  - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
  - c. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
  - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
  - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

(Sutedi, 2009) Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan

*Good Governance:*

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan.
- d. Ketersediaan payung hukum bagi akses informasi publik.
- e. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi.
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik.
- g. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik.
- h. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik.

#### **2.3.6 Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen (Akbar, 2012). Lebih lanjut dikaitkan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yaitu *accountability for probity and legality*, *process Accountability*, *performance Accountability*, *programme Accountability*, *policy Accountability*.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi

dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Annisaningrum (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit) atau respon pemerintah.

Dalam pasal 7 Undang- Undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

#### **2.3.6.1 Dimensi Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Adrianto, 2007:23) :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).  
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial.  
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

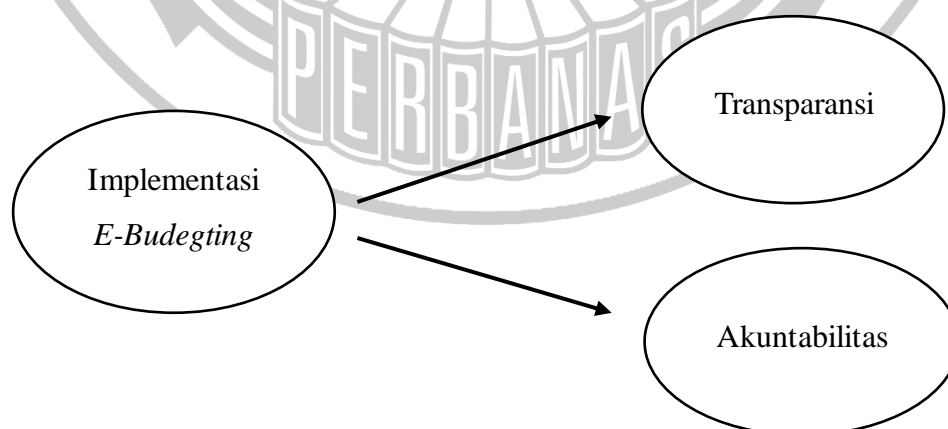
#### 4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

#### 5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

### 2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini hipotesis yang akan digunakan untuk mengkaji variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terkait sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh implementasi *e-Budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah pada pemerintah Kota Surabaya.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh implementasi *e-Budgeting* terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Surabaya.

